

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, cetakan pertama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Afhami Sahal, *Hukum Perjanjian Kredit (Rekonstruksi Perjanjian Standaard dalam Perjanjian kredit di Indonesia)*, (Sleman : Phoenix Publisher, 2019)
- Arie Sukanti Hutagalung, *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Brama Hardi Wardana, *Cara Hebat Anti Mafia Tanah* (Apple Books, distribusi Draft Digital, 2024),
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta : Radjawali, 1989)
- Elza Syarief, *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014),
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Muller. 1999)
- Habib Adjie, *Kebatalan & Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Prenada Media, 2020.)
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016)
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori hukum*, (Malang: Setara Press, 2018)
- Irma Devita Purnamasari, *Hukum Pertanahan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2012)
- Isnaini, et.all, *Hukum Agraria :Kajian Komprehensif*, (Medan: Pustaka Prima, 2022)
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Jakarta: Alumni, 1986)

- M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025)
- Mahfud MD, *Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar: Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara: Mataram University, 2020)
- Muhamad Sadi Is, et.all, *Hukum Perdata* (Bali: Intelektual Manifes Media,. 2024)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Pendekatan Kontemporer) (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*. (Aceh: Unimal Press, 2013)
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- _____, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2008)
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995)
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Jurnal

- Anisya Rua Ratu Liu, Susilowati Suparto, dan Sridewi Anggraeni Wiyono, “Penjualan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12173889>
- Carolina Da Cruz dan Dyah Ayu Sulistyarini, “Problematisasi Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait Sengketa Sertifikat Tanah yang Overlapping”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 6, No. 1, 2025. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11904>

- Dian Samudra, Ujang Hibar, "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1 Januari 2021.
<https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Fara Salsabila, "Penyuluhan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta yang Dibuatnya", *Jurnal Ilmiah Nusantara* Vol.2, No.2, 2025.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3828>
- Hatta Isnaini, dan Hendry Dwicahyo Wanda. "Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 3 (2017), DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss3.art7
- Laela Dwi Cahyannia, Supriyadi, "Peran Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah Kabupaten Klaten Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Menjalankan Tugas Jabatan," *Jurnal Hukum Tora*, Volume 8 Issue 3, 2022
<http://dx.doi.org/10.55809/tora.v8i3.163>
- Muhammad Iqbal Akbar Nugraha, Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kota Tasikmalaya, *Notarius*, vol. 15, no. 2, 2022,
<https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.35954>
- Nadya Paramitha, Kurnia Warman, Hengki Andora, "Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah di Kabupaten Agam," *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5 No. 4 2023.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.743>
- Novita Putri Yunardi, Raffles, Taufik Yahya, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Akta Jual Beli Tanah," *Wajah Hukum*, Vol 9, No 1, 2025
<http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1802>
- Oci Senjaya, "Tanggung Jawab PPAT Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 5, No. 2 (2020) <https://doi.org/10.35706/positum.v5i2>
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Redika Rahma Ayunisa, "Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023.
<http://dx.doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.194>

Syarif Hadi Kusuma, " Pembatalan Akta Jual Beli Yang Disebabkan Oleh Pemalsuan Tanda Tangan." Jurnal Sains Student Research ,Vol 2, No. 1, 2024 <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.974>

Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional," Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 10, No 1, 2019. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.407>

Tubagus Reyhan Ramadhiansa, Ernu Widodo, dan M. Yustino Aribaawa. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Antara Penjual Dan Pembeli: Studi Putusan Nomor 265/Pdt. G/2024/PN Sby." COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5, No. 6 (2025). <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2040>

Vanessa Maurizkha, Akhmad Budi Cahyono, "Legalitas Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Tanah dan/atau Bangunan (Studi Putusan Putusan Pengadilan)," Unes Journal of Swara Justisia, Volume 8, Issue 4, Januari 2025 <https://doi.org/10.31933/2nsj3r37>

Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party Acte, Lex Renaissance, No.1 Vol.2, 2 Januari 2017 <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>

Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar dan Nanda Anisa Lubis, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", Acta Diurnal Vol.3, No.1, 2019, <http://doi.org/10.24198/acta.v3i1.266>

Yudi Syahputra, Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, "Result of the law of the debt agreement with the transfer of land rights as the payment of debtor fail," Research Fair Unisri, Vol. 7 No. 2 (2023) <https://doi.org/10.33061/rsfu.v7i2.9230>

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507K/PDT/2023 tanggal 13 November 2023

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 800/PDT/2022/PT.Sby tanggal 24 Januari 2023

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 3 November 2022

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Robbyson Halim Notaris/PPAT di Depok dan dosen Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Zoom, Tanggal 7 Mei 2025, Pukul 20.30 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu dengan Ibu Anne Gunadi Martono Widjojo Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat dan dosen Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Tanggal 17 Mei 2025, Pukul 11.00 WIB.